
MODEL REKRUTMEN POLITIK CALON ANGGOTA LEGISLATIF OLEH PARTAI POLITIK DI KABUPATEN SIDOARJO

Ahmad Riyadh U.B
Hendra Sukmana

(Program Studi Ilmu Administrasi Negara – FISIP – Universitas Muhammadiyah
Sidoarjo, Jalan Mojopahit 666 B Sidoarjo,
email: riyadhadvokat@yahoo.com, hendra_sukmana91@yahoo.co.uk)

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah membahas model rekrutmen calon anggota legislatif yang dilakukan oleh partai politik di Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan pada Dewan Pimpinan Partai Politik di Kabupaten Sidoarjo. Narasumber atau subyek penelitian ini adalah pimpinan partai politik di Kabupaten Sidoarjo, calon anggota legislatif dari partai politik di Kabupaten Sidoarjo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model rekrutmen calon anggota legislatif partai politik di Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan model rekrutmen politik dari kolaborasi model rekrutmen antara lain model Barber, Snowiss, Rush & Althoff dkk. Hal tersebut dilihat dari beberapa langkah dalam rekrutmen sosialisasi pendaftaran, seleksi, setelah itu dilakukan dengan penetapan calon anggota legislatif oleh tim Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) partai politik di Kabupaten Sidoarjo dan pemberian nomor urut sesuai dengan kriteria ketua umum partai politik dan Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu). Selanjutnya, didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sidoarjo untuk ditetapkan menjadi Calon Anggota Legislatif (Caleg) tetap dengan nomor urutnya.

Kata kunci: model rekrutmen politik, calon anggota legislatif, parpol

DYNAMICS OF LEGISLATIVE MEMBER CANDIDATES BY POLITICAL PARTIES IN SIDOARJO REGENCY

ABSTRACT

The aim of this research was to discuss the model of recruiting candidates for legislative is conducted by political parties in Sidoarjo Regency. This research used descriptive qualitative. This research was conducted at the Governing Council of Political Parties in Sidoarjo Regency. Informants of this study were leaders of political parties in Sidoarjo, legislative candidates from political parties in Sidoarjo. The results showed that the model of recruiting candidates for legislative in accordance with collaboration models included models of Barber, Snowiss, Rush & Althoff et al. This can be seen from some of the steps in the recruitment socialization of registration, selection, after that determination of legislative candidate by a team of Election Campaign Boar (Bappilu) political party in the Sidoarjo Regency and the serial number in accordance with the criteria of the political party chairman and Election Campaign Boar (Bappilu). Furthermore, it is registered with the General Election Commission (KPU) Sidoarjo regency set to be candidates for Legislative (candidates) remain with serial numbers.

Keywords: model of political recruitment, legislative candidates, political parties

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara demokrasi yang memiliki ciri adanya pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat di lembaga legislatif. Pemilihan umum merupakan cara perekrutan anggota legislatif yang digunakan oleh sebagian besar negara di dunia, termasuk Indonesia. Rakyat yang memiliki kedaulatan tertinggi dalam negara demokrasi memiliki hal dalam menyuarakan pilihannya melalui pemilihan umum untuk menentukan wakilnya sebagai anggota dewan.

Partai politik berperan aktif dalam proses pemilihan umum yang berlangsung 5 tahun sekali. Selain itu, kewajiban partai politik adalah memberikan pendidikan politik kepada masyarakat agar masyarakat tidak apatis dalam setiap pemilihan umum yang digelar. Hal ini karena partai politik juga merupakan sebuah wadah atau sarana bagi warga negara atau masyarakat untuk turut terlibat berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi dan pengelolaan sebuah Negara. Partai politik diharapkan memiliki tujuan untuk menjadi penghubung antara masyarakat dan pemerintah dalam rangka menyalurkan aspirasi rakyat.

Salah satu ciri dari pelaksanaan sistem demokrasi di Indonesia adalah adanya pemilu. Pemilu merupakan suatu proses substitusi kekuasaan di Indonesia.

Dasar hukum pemilihan umum di Indonesia adalah Undang-undang nomor 08 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sementara itu, pihak yang mengatur proses tersebut adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang diatur berdasarkan pasal 1 disebutkan bahwa KPU merupakan lembaga yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri untuk menyelenggarakan Pemilu di Indonesia.

Selain itu, poin lain yang diatur dalam UU nomor 08 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, adalah pasal 65 ayat 2 dan 3 yang menyebutkan bahwa : setiap partai politik peserta Pemilu dapat mengajukan calon sebanyak-banyaknya 120% jumlah kursi yang ditetapkan pada setiap daerah pemilihan. Sedangkan di ayat 3 Pengajuan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan ketentuan:

- a. Calon anggota DPR disampaikan Kepada KPU
- b. Calon anggota DPRD Provinsi disampaikan kepada KPU Provinsi yang bersangkutan; dan
- c. Calon anggota DPRD Kabupaten/Kota disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Berdasarkan ketentuan Undang-undang diatas, posisi tawar partai politik diberikan peran yang sangat strategis dalam menentukan kualitas dan kelayakan calon pemimpin yang ada di daerah maupun di pusat. Partai politik yang menjadi satu-satunya agen dalam perekrutan individu-individu (masyarakat) menjadi calon anggota legislatif yang nantinya akan dipilih langsung oleh rakyat. Dengan demikian, kualitas seleksi dan model rekrutmen calon anggota legislatif dari partai politik akan berpengaruh terhadap kualitas calon yang akan bersaing dalam setiap pemilihan umum.

Dalam perwujudan DPR yang bersih dari korupsi, maka masyarakat harus mengkritisi sejak partai politik (parpol) melakukan rekrutmen terhadap calon legislatif (caleg) dari pusat sampai daerah. Hal tersebut karena perekrutan rekrutmen caleg ini akan dilihat kebersihan dan komitmen parpol yang anti korupsi dan nantinya akan berdampak pada DPRD Kabupaten Sidoarjo yang diisi oleh 50 orang. Hal tersebut memiliki peran penting mengingat proses rekrutmen kader caleg tersebut adalah kunci integritas parpol dalam mewujudkan parpol dan DPRD yang bersih.

Berdasarkan latar belakang di atas dirumuskan masalah, bagaimana model rekrutmen calon anggota legislatif oleh partai politik di Kabupaten Sidoarjo. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui model rekrutmen calon anggota legislatif yang dilakukan oleh partai politik di Kabupaten Sidoarjo.

LANDASAN TEORETIS

Partai Politik

Partai politik pertama-tama lahir di negara Eropa barat. Dengan meluasnya gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu diperhitungkan serta diikutsertakan dalam proses politik, maka partai politik lahir secara spontan dan berkembang menjadi penghubung antara rakyat disatu pihak dan pemerintah di pihak lain. Neumann (Budiardjo, 2002:162) dalam karangannya *Modern Political Parties* mengemukakan definisi sebagai berikut: “partai politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda” salah satu fungsi dari partai politik adalah sebagai sarana rekrutmen politik yaitu untuk mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai (political recruitment).

Konsep ideal rekrutmen politik menurut Almond digambarkan sebagai kegiatan “merekut anggota-anggota dari masyarakat dan dari subkultur khusus-komunitas keagamaan, status, kelas, komunitas etnik, dan yang serupa- dan melibatkan mereka pada peranan khusus dari sistem politik, melatih mereka dalam kemampuan yang tepat, memberikan mereka dengan peta, nilai, pengharapan, dan pengaruh-pengaruh kognitif politik” (Czudnowski dalam Soetomo, 2007: 51).

Model Rekrutmen

1. Model Barber

Menurut Barber ada tiga dimensi (variabel utama) rekrutmen, yaitu: motivasi, sumber daya, dan kesempatan. Dampak mereka adalah komulatif dan mereka tidak dapat dioperasionalkan secara sendiri-sendiri satu sama lain. Kandidat yang potensial perlu dimotivasi untuk mencari jabatan, tapi berbagai motivasi dapat mengarah pada suatu pencalonan, sumber dayanya dapat terdiri dari aset-aset tersebut seperti fleksibilitas pekerjaan dan kemampuan untuk membuat pengorbanan finansial yang diperlukan; akhirnya, kesempatan membandingkan kompatibilitas dengan kriteria pemilihan dari perwakilan perekrutan dan tingkat ketidakpastian mengenai hasil dari pemilihan (Edinger dalam Soetomo, 2007: 55). Browning (1968) sebagaimana dikutip oleh Edinger, memperkuat model Barber menurutnya perilaku perekrutan ditentukan oleh sindrom motivasional dan pengharapan. Pengharapan diperoleh dalam proses sosialisasi, dan mereka menyalurkan motivasinya pada arena politik, tapi tipe dari para pejabat mencari dan perilaku politikus ditentukan oleh motivasi dominannya.

2. Model Snowiss

Model Snowiss (1966) sebagaimana dikutip oleh Edinger, mengemukakan model perekrutan politik dengan memusatkan dalam aspek-aspek yang relevan terhadap kebutuhan organisasi. Terdapat empat variable dalam metode ini: (1) dasar sosial, yang mana untuk partai merupakan hal yang utama dibandingkan elektoral umum, (2) sumber daya organisasi yang dapat digunakan sebagai insentif untuk memobilisasi pekerjaan partai dan menarik para elite politik; material atau non material, (3) struktur; hirarki, kepemimpinan tersentral, tidak dapat dipengaruhi oleh dunia luar, (4) etos organisasi. Struktur hirarki dari organisasi partai mempromosikan suatu etos persetujuan politik; partai-partai yang kurang terstruktur mempromosikan orientasi persoalan, etos ideologi.

3. Model Rush & Althoff

Menurut Michael Rush dan Philip Althoff model perekrutan politik meliputi lima proses kegiatan, yaitu: penyediaan dan permintaan, agensi, kriteria, kontrol, dan tuntutan. Daya penyediaan dan permintaan dipengaruhi oleh berbagai lembaga yang berfungsi sebagai agensi perekrutan politik, kriteria yang mungkin digunakan, dan oleh kadar sejauh mana proses itu dapat dikontrol.

Agensi perekrutan politik menetapkan beraneka ragam kriteria, meliputi ciri-ciri dan keterampilan yang mereka anggap layak dan harus dikuasai oleh calon pejabat yang bersangkutan. kriteria ini, tentu saja akan mencerminkan permintaan yang merupakan representatif atas tuntutan dan harapan masyarakat, tetapi mereka juga akan mempengaruhi sistem pengadaan, sehingga proses kontrol akan semakin ketat dan kompetitif (Rush & Althoff, 1997: 245-246).

Rekrutmen Politik di Indonesia

Di masa orde baru, rekrutmen politik di Indonesia pada dasarnya sangatlah tertutup. Hal ini terjadi karena dominannya lembaga kepresidenan. Siapa yang akan menjabat, apa, kapan, dan dimana, sama sekali tidak melibatkan anggota masyarakat. Proses rekrutmen sering kali didasarkan pada dasar *patronage* politik, dan bukan atas dasar kapasitas dan kepemimpinan. Akibatnya, tidak jarang kepemimpinan orang yang memegang jabatan mendapat resistensi dari masyarakat. Hal tersebut, karena yang memegang jabatan bukanlah orang yang memiliki kecakapan atau kemampuan yang diperlukan untuk jabatan tersebut. Kasus tersebut, misalnya dalam jabatan pimpinan partai politik, siapa yang menjadi ketua partai politik bukanlah seseorang yang memiliki basis dukungan

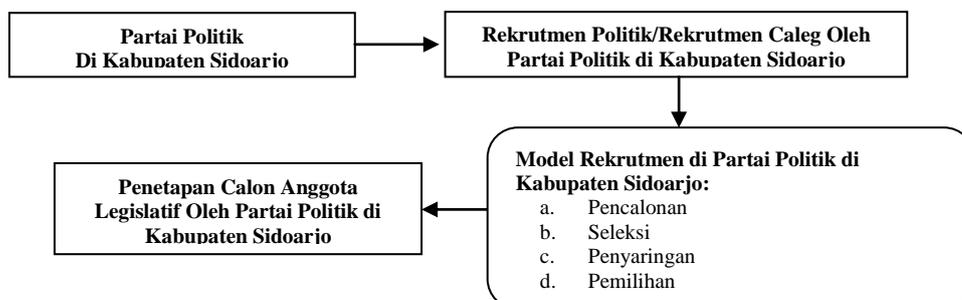
massa yang kuat, tetapi yang mendapatkan dukungan dari kalangan pemerintah (Gaffar, 1999: 155-156).

Demikian juga rekrutmen di tingkat lokal, dalam proses pemilihan gubernur/kepala daerah, masyarakat di daerah tidak mempunyai kapasitas untuk ikut menentukan. Karena biasanya siapa yang akan menjadi gubernur ditentukan oleh kekuatan yang berada di pusat pemerintahan. Pada masa reformasi perubahan ini tidak terlalu signifikan, politik patronage masih terasa kental. Satu perubahan yang paling menonjol dalam rekrutmen politik di era reformasi adalah bukan terletak pada dominannya lembaga kepresidenan, akan tetapi terletak pada dominannya ketua partai penguasa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Dengan harapan mampu menggambarkan secara utuh dan komprehensif tentang fenomena yang diteliti sebagaimana yang telah dijabarkan dalam fokus penelitian. (Creswell, 2014:4-5). Penelitian ini dilakukan pada Dewan Pimpinan Partai Politik di Kabupaten Sidoarjo. Dengan narasumber atau subyek penelitiannya adalah pimpinan partai politik di Kabupaten Sidoarjo, calon anggota legislatif dari partai politik di Kabupaten Sidoarjo. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif model (Miles dan Huberman, 2014:18) yaitu reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan/verifikasi. Sedangkan teknik pengumpulan datanya menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penyajian hasil penelitian ini dilakukan melalui kerangka konseptual sebagai berikut:

Gambar 1.
Kerangka Konseptual



Sumber : Diolah oleh penulis

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Proses Model Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Oleh Partai Politik Di Kabupaten Sidoarjo

Mekanisme penjaringan model rekrutmen calon anggota legislatif. Pada masing-masing partai politik di Kabupaten Sidoarjo memberikan syarat-syarat tersendiri bagi bakal Calon Anggota Legislatif untuk menjadi Calon Anggota Legislatif yang mewakili partai politik yang akan didaftarkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sidoarjo. Syarat pada masing-masing partai politik pastilah berbeda satu sama lain dengan kriteria-kriteria khusus. Ideologi partai politik menjadi kriteria tersendiri dalam menentukan syarat bagi bakal caleg yang ingin menjadi caleg di partai politik.

Beberapa syarat baku atau mutlak yang diterapkan oleh pemerintah untuk syarat menjadi anggota partai politik yakni, Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, BAB VII, Bagian Kesatu tentang Persyaratan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Pasal 51 menulis syarat bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia (WNI) dengan persyaratan,

1. Telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih.
 2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 3. Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 4. Cakap berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia.
 5. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau pendidikan lain yang sederajat.
 6. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
 7. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
 8. Sehat jasmani dan rohani.
 9. Terdaftar sebagai pemilih.
 10. Bersedia bekerja penuh waktu.
 11. Mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada
-

badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali.

12. Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara.
14. Menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu.
15. Dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan
16. Dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan.

Berikut ini tahapan proses model rekrutmen calon anggota legislatif oleh partai politik di masing-masing partai politik di Kabupaten Sidoarjo:

1. Partai Golongan Karya (Golkar)

Terkait dengan model/pola rekrutmen calon anggota legislatif oleh partai politik di Kabupaten Sidoarjo berikut kutipan wawancara dengan Narasumber di Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kabupaten Sidoarjo, tim peneliti mewawancarai Agus Yudi Setiawan, S.Pd.I selaku wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kabupaten Sidoarjo. Kepada kami, Agus Yudi Setiawan, S.Pd.I menjelaskan model rekrutmen calon anggota legislatif di Partai Golkar Kabupaten Sidoarjo :

“Di Partai Golkar model rekrutmen calon anggota legislatif lebih banyak mengoptimalkan potensi kader internal Partai Golkar maupun HASTA KARYA organisasi yang mendirikan atau didirikan Partai Golkar sehingga dalam perekrutan Calon Anggota Legislatif di Partai Golkar mengambil dari kader Partai Golkar sendiri. Tanpa mengambil atau mencomot kader dari luar partai Golkar. Dalam penentuannya sendiri di Partai Golkar menjelang pemilu legislatif dibentuk yang namanya tim 9 : tim ini yang nantinya menyeleksi bakal Calon Anggota Legislatif dari partai Golkar. Tim 9 Partai Golkar Kabupaten Sidoarjo beranggotakan ketua, sekretaris dan para wakil ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kabupaten Sidoarjo. Faktor pendukung dalam rekrutmen calon anggota legislatif di Partai Golkar Kabupaten

Sidoarjo yaitu, pengakaderan yang baik di Golkar merupakan salah satu aspek pendukung dalam rekrutmen caleg. Faktor penghambat dalam rekrutmen calon anggota legislatif di Partai Golkar yakni kesulitan pemenuhan kuota 30% caleg perempuan.”

Dari sedikit kutipan wawancara diatas di partai Golkar partai yang mengedepankan pembinaan kader Partai Golkar. Partai berlambang beringin dengan kemapanan partai lawas era orde baru tetap mengedepankan perekrutan model lama dengan semua Calon Anggota Legislatifnya berasal dari kader internal sendiri.

2. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

Wawancara tim peneliti dengan fungsionaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Sidoarjo H. Nur Ahmad Syaifuddin, S.Ag. kutipan wawancara dari H. Nur Ahmad Syaifuddin, S.Ag

“Partai Kebangkitan Bangsa lebih melakukan pendekatan kultural dalam model rekrutmen calon anggota legislatif Partai Kebangkitan Bangsa tidak seperti kebanyakan partai lain yang lebih mengedepankan kontrak politik bersifat finansial di depan. Partai Kebangkitan Bangsa lebih mengedepankan ketokohan berbasis agama dan kultural dalam model rekrutmen calon anggota legislatifnya. PKB Kabupaten Sidoarjo membentuk tim Badan Pemenangan Pemilu dalam upaya menyeleksi calon anggota legislatif yang di dalamnya terdiri dari unsur penasehat Nahdatul Ulama, unsur akademisi, dan pimpinan Partai Kebangkitan Bangsa. Yang mana model perekrutan berdasarkan ranking yang dilakukan Bappilu dalam menyeleksi calon anggota legislatif. Faktor pendukung dalam rekrutmen calon anggota legislatif di PKB yaitu banyak kader dari PKB yang mayoritas pimpinan organisasi Nahdliyyin menjadi satu senjata sendiri yang nantinya bakal meraup suara yang besar. Karena mayoritas penduduk di Sidoarjo merupakan Nahdliyyin. Faktor penghambat dalam rekrutmen calon anggota legislatif di PKB yakni persaingan antar caleg yang menginginkan posisi dapil tertentu”.

Berdasarkan kutipan wawancara diatas, Partai Kebangkitan Bangsa sebagai salah satu partai terbesar di Kabupaten Sidoarjo yang merupakan pemenang pemilu di Kabupaten Sidoarjo. Dalam hal model rekrutmen calon anggota legislatif lebih dengan pendekatan agama dan kultural yang mana ketokohan bakal calon anggota legislatif lebih diutamakan dan menjadi nilai plus dimata Bappilu selaku tim seleksi bakal calon anggota legislatif di PKB, untuk menjadi calon anggota legislatif dari PKB selain diantaranya beberapa syarat lain.

3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)

Wawancara tim peneliti dengan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo sekaligus fungsionaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP dr. H. Wijono terkait dengan model rekrutmen calon anggota legislatif di partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Sidoarjo. dr. H. Wijono menjelaskan kepada kami:

“Model rekrutmen Calon Anggota Legislatif di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) lebih bersifat bottom up lain dari kebiasaan partai politik kebanyakan model perekrutannya dengan model top down. Tetapi layaknya partai lawas kebanyakan, PDIP tidak mengambil Calon Anggota Legislatif dari luar kader PDIP. Pengkaderan PDIP lebih banyak di Ranting tingkat desa/kelurahan bahkan RW sebagai poros pengkaderan dan perekrutan politik khususnya Calon Anggota Legislatif PDIP tidak memandang kader ranting maupun pengurus DPC yang terpenting bisa bersaing memperjuangkan aspirasi rakyat dia yang dipilih.”

Dari sedikit kutipan, wawancara di atas dapat di jelaskan model rekrutmen di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Sidoarjo lebih memahami ideologi marhenisme sebagai ideologi mensejahterakan rakyat. PDIP mempunyai kader dan basis massa yang mengakar jadi tidak salah model rekrutmen Calon Anggota Legislatif dari PDIP bersifat *bottom up*.

4. Partai Demokrat

Berdasarkan wawancara tim peneliti dengan Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Sidoarjo Bapak H. Sarto, ST di kediamannya di Kecamatan Waru. Berikut ini kutipan wawancara antara tim peneliti dengan bapak H. Sarto, ST

“Dalam pola atau model rekrutmen Calon Anggota Legislatif di DPC Partai Demokrat Kabupaten Sidoarjo. Terdapat tim yang di bentuk yang hampir di kebanyakan partai politik memakai tim ini yakni Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu). Namun, tim ini tetap berada dalam kontrol ketua DPC partai Demokrat Kabupaten Sidoarjo. Dalam model perekrutan kami dari Partai Demokrat Kabupaten Sidoarjo lebih menekankan pada merekrut kader-kader internal dari partai Demokrat sendiri. Namun, yang menjadi catatan disini Calon Anggota Legislatif yang maju lewat Partai Demokrat harus kuat dari sisi finansial yang paling utama baru kedua dan seterusnya dari sisi ketokohan, sisi loyalitas terhadap partai dll. Dari segi tersebut, partai Demokrat tidak menutup kemungkinan untuk merekrut caleg dari eksternal yang kuat dari sisi kemampuan finansial. Karena dimasa seperti sekarang ini kita

harus realistis sebagai ketua Partai Demokrat Kabupaten Sidoarjo, saya sadar betul masyarakat masih tetap pada paradigma “ada uang kami pilih” jadi tanpa ada modal finansial yang kuat kecil kemungkinan untuk menjadi anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo. Jadi tolak utama model perekrutan dari Partai Demokrat kabupaten Sidoarjo yang paling kuat secara finansial dipersilahkan untuk caleg dari Partai Demokrat. Yang menjadi faktor penghambat dalam perekrutan caleg di partai kami, partai kami beberapa tahun seolah dihancurkan oleh media sehingga tidak seperti pemilu 2009 pemilu 2014 sangat sulit partai Demokrat mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap partai berlambang mercy. Namun, ada faktor pendukungnya sebagian masih tetapp yakin Partai Demokrat dibawah kendali SBY tetap menjadi primadona tersendiri bagi bakal caleg.”

Dari kutipan wawancara diatas, dapat terlihat bawasannya Dewan Pimpinan Cabang (DPC) partai Demokrat Kabupaten Sidoarjo. Dalam hal, model rekrutmen Calon Anggota Legislatif dalam internal partai lebih mengutamakan kemampuan inancial dari bakal caleg untuk di jadikan caleg dari partai Demokrat Kabupaten Sidoarjo. Dalam perekrutannya partai Demokrat Kabupaten Sidoarjo lebih mendahulukan kader internal lebih dahulu dengan persyaratan di atas. Namun, apabila kader internal kesulitan memenuhi syarat tersebut maka, tim Bappilu mencari inancial e dari kader eksternal dengan kemampuan inancial yang kuat.

5. Partai Nasional Demokrat (NASDEM)

Berdasarkan wawancara tim peneliti dengan Sekretaris Umum DPD Partai Nasional Demokrat Kabupaten Sidoarjo sekaligus Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo periode 2014-2019 bapak Ali Masykuri, S.Pd, M.Pd.I. Berikut kutipan wawancara dengan Ali Masykuri, S.Pd, M.Pd.I.

“Terkait dengan model rekrutmen bakal calon anggota inancial e di DPD Partai Nasdem Kabupaten Sidoarjo, partai lebih mengedepankan model rekrutmen kader yang sudah “jadi” atau berproses di partai politik lain sebelumnya. Karena tidak bisa dipungkiri partai Nasdem merupakan partai politik debutan di pemilu 2014 kemarin. Terkait alurnya inanc sama dengan kebanyakan partai politik di Sidoarjo diantaranya, terdapat sosialisasi, pelatihan seremonial, penetapan caleg oleh tim Badan Pemenangan Pemilu dll. Namun, karena pendatang baru Partai Nasdem lebih mengedepankan sosok bakal caleg yang sudah berproses di partai politik lain dengan beberapa inancia antara lain ketokohan, inancial, dan kematangan visi. Caleg yang eksternal yang sebelumnya bukan kader partai Nasdem setelah ditetapkan dan terpilih mewakili Partai Nasdem harus menjadi anggota Partai Nasdem. Untuk faktor penghambat Partai Nasdem karena merupakan partai pendatang

baru mengalami kesulitan untuk mendapatkan tokoh-tokoh terbaik dari putra-putri terbaik Kabupaten Sidoarjo. Faktor pendukungnya sebagai pendatang baru Partai Nasdem Partai yang dikomandoi Surya Paloh ini bisa dilihat sendiri mapan secara inancial dapat diketahui dengan sekretarian DPD Partai Nasdem yang berada di Jalan Raya Strategis.”

Dari kutipan wawancara di atas, dapat dilihat Partai Nasional Demokrat Kabupaten Sidoarjo sebagai salah satu partai politik pendatang baru. Dalam hal perekrutan Calon Anggota Legislatif untuk didudukkan di kursi Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo. Lebih mengedepankan sosok Calon Anggota Legislatif yang sudah berproses di partai politik lain secara matang. Lebih memprioritaskan ketokohan, kematangan visi dan finansial yang se-ideologi dengan visi misi partai Nasional Demokrat. Untuk segi finansial partai Nasional Demokrat merupakan partai pendatang baru yang kuat secara finansial.

6. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Berdasarkan wawancara tim peneliti dengan caleg Partai Keadilan Sejahtera sekaligus anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo periode 2014-2019 bapak Mulyono, SH. Memberikan penjelasan tentang model rekrutmen caleg dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Sidoarjo. Berikut ini kutipan wawancara tim peneliti dengan bapak Mulyono, SH

“Terkait dengan model rekrutmen calon anggota legislatif oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kebetulan saya kader dari eksternal partai yang maju mencalonkan diri dari PKS. Ditanya model rekrutmen, di PKS model rekrutmennya terbuka yang memiliki basis suara yang besar diajak oleh tim pemenangan pemilu dari PKS. Memang kebanyakan dari kader internal partai, namun di PKS model rekrutmennya memang dengan cara pendekatan terhadap caleg yang memiliki basis suara yang besar. Model rekrutmen PKS lebih pada pendekatan langsung kepada bakal caleg. Faktor pendukung basis massa PKS yang cukup besar membuat banyak bakal caleg yang berminat untuk mengajukan diri menjadi Caleg dari PKS. Faktor penghambatnya sendiri, PKS masih kalah bila dibandingkan dengan Partai berkekuatan ormas islam terbesar diantaranya PKB, PPP dengan Nunya dan PAN dengan Muhammadiyah.”

Berdasarkan kutipan wawancara di atas, dapat terlihat bawasannya model rekrutmen Calon Anggota Legislatif dari Partai Keadilan Sejahtera menggunakan tim pemenangan pemilu yang melakukan perekrutan langsung dengan cara pendekatan dan merekrut kader yang potensial memenangkan kursi DPRD dengan basis massa atau basis suara yang jelas atau kekuatan finansial yang kuat.

7. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

Berdasarkan wawancara tim peneliti dengan Wakil Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Memberikan penjelasan tentang model rekrutmen calon anggota legislatif di Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Sidoarjo. Berikut ini kutipan wawancara tim peneliti dengan bapak Drs. Puji W.:

“Model rekrutmen calon anggota legislatif di DPD Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Sidoarjo. Lebih mengutamakan kader dari internal partai untuk di jadikan calon anggota legislatif yang mewakili Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Sidoarjo. Proses mekanisme hampir sama dengan di partai politik lain di Sidoarjo dalam prosesnya dimulai dari sosialisasi, pendaftaran, seleksi oleh tim Bappilu, dan terakhir penetapan calon anggota legislatif. Syarat dari PPP untuk bakal caleg di partai kami mudah hanya tunduk pada aturan yg berlaku di partai kami. tim Bappilu merupakan tim yang menhandel proses rekrutmen caleg di partai kami. sosialisasi rekrutmen caleg di partai kami di lakukan sampai tingkat sampai tingkat ranting. Faktor pendukung dalam rekrutmen caleg di PPP Sidoarjo, tahun 2013 ini PPP banyak kader yang berkualitas sehingga tim Bappilu tidak kesulitan dalam mencari kader terbaik yang ditempatkan di komposisi caleg yang mewakili PPP. Faktor penghambat dalam rekrutmen caleg di PPP Sidoarjo, tentang masalah biaya kampanye yang mahal hal ini tidak dapat dipungkiri karena politik era saat ini cost biayanya cukup besar apalagi di dapil-dapil yang ketat.”

Berdasarkan kutipan wawancara di atas, dapat terlihat bawasannya model rekrutmen Calon Anggota Legislatif dari Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Sidoarjo menggunakan tim badan pemenangan pemilu yang melakukan perekrutan dengan cara pendekatan kultural. Selain itu, tim Bappilu PPP memiliki peran yang sangat strategis dan berpengaruh dalam rekrutmen calon anggota legislatif di Kabupaten Sidoarjo.

8. Partai Bulan Bintang (PBB)

Berdasarkan wawancara tim peneliti dengan ketua DPC Partai Bulan Bintang Drs. Achmad Munawwir. Berikut ini kutipan wawancara antara tim peneliti dengan Bapak Drs. Achmad Munawwir.

“Dalam perkembangan model rekrutmen calon anggota legislatif dari PBB. Cara perekrutan PBB seperti kebanyakan partai politik lain. Karena kita sadar dari awal berdirinya PBB partai ini kurang mendapatkan antusiasme dari masyarakat/pemilih. Jadi ketika ditanya model rekrutmen calon anggota legislatif yang ada di PBB. Mulai dari

sosialisasi, pembukaan pendaftaran, dan penetapan caleg oleh Badan Pemenangan Pemilu Partai Bulan Bintang. Hampir semua caleg dari PBB merupakan kader internal dari PBB disesuaikan dengan jabatan yang ada distruktural PBB. Ideologi PBB partai islam yang non muhammadiyah maupun Nahdatul Ulama yang menjadi jati diri PBB dari dulu. Faktor penghambat dari model perekritan caleg di PBB yakni, kurang nya basis massa yang besar membuat kader pikir-pikir untuk menjadi caleg dari PBB. Faktor pendukung, masih banyak kader PBB yang militan untuk berjuang membesarkan partai.”

Dari kutipan wawancara di atas. Dapat terlihat terkait model rekrutmen Calon Anggota Legislatif di Partai Bulan Bintang Kabupaten Sidoarjo. Lebih mengedepankan kader dari internal Partai. Hal tersebut juga dilihat dari loyalitas, dan jabatan di struktural PBB. Kurangnya basis massa PBB menjadi faktor penghambat tersendiri dari Partai Bulan Bintang. Untuk menyetorkan kader-kader terbaik dari Partai untuk bertarung di pemilihan legislatif 2014 yang lalu.

9. Partai Amanat Nasional (PAN)

Berdasarkan wawancara tim peneliti dengan fungsionaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN). Memberikan penjelasan tentang model rekrutmen calon anggota legislatif di Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Sidoarjo. Berikut ini kutipan wawancara tim peneliti dengan bapak Ucok F. Situmorang, S.Sos :

“PAN menunjuk tim Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) sebagai pelaksana rekrutmen calon anggota legilatif. Yang pertama di mulai dari pembukaan sosialisasi dan pendaftaran. Dilanjutkan dengan proses penjarangan atau seleksi yang cukup ketat yang melibatkan ketua DPC PAN Kabupaten Sidoarjo. Yang terakhir penetapan bakal calon anggota legislatif menjadi calon anggota legislatif yang mewakili Partai Amanat Nasional (PAN) yang ditetapkan oleh Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) atas persetujuan dan rekomendasi Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Sidoarjo. Faktor pendukung dalam rekrutmen calon anggota legislatif Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Sidoarjo, yakni di PAN pengkaderan termasuk salah satu yang terbaik diantara partai politik di Kabupaten Sidoarjo. sehingga dalam rekrutmen caleg PAN di berikan banyak pilihan untuk menepatkan wakilnya untuk caleg di PAN Kabupaten Sidoarjo. Faktor penghambat dalam rekrutmen calon anggota legislatif di PAN Kabupaten Sidoarjo adalah persaingan dengan caleg dari partai

lain yang sudah mapan di dapil tertentu membuat banyak caleg yang mundur.”

Berdasarkan kutipan wawancara di atas, dapat terlihat bawasannya model rekrutmen Calon Anggota Legislatif dari Partai Amanat Nasional Kabupaten Sidoarjo menggunakan kader internal dalam berjuang untuk memenangkan pemilihan umum legislatif.

10. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)

Berdasarkan wawancara tim peneliti dengan Sekretaris umum Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra. Memberikan penjelasan tentang model rekrutmen calon anggota legislatif di Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo. Berikut ini kutipan wawancara tim peneliti dengan bapak Bambang Pujiyanto, S.Sos :

“Tahapan pertama, membuka pendaftaran bagi kader internal maupun eksternal yang ingin menjadi calon anggota legislatif di Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo proses pendaftaran dikawal oleh tim Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo. Setelah, itu tahap seleksi bakal calon anggota legislatif yang di lakukan oleh Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo. Penetapan bakal calon anggota legislatif untuk menjadi calon anggota legislatif mewakili partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo oleh tim Bappilu dengan kriteria penilaian mengacu pada syarat-syarat ketokohan, modal finansial, posisi di struktural partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo dll. Faktor pendukung dalam rekrutmen calon anggota legislatif di Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo adalah partai yang didirikan oleh Prabowo Subianto ini telah memiliki nama di masyarakat. Sehingga banyak kader internal maupun eksternal partai yang berminat menjadi calon anggota legislatif. Faktor penghambat dalam rekrutmen calon anggota legislatif di Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo adalah kader yang mempunyai masa bhakti yang lama. Seringkali mundur dari proses pencalegan karena biaya politik yang cukup mahal.”

Berdasarkan kutipan wawancara di atas, dapat terlihat bawasannya model rekrutmen Calon Anggota Legislatif dari Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo menggunakan tim badan pemenangan pemilu yang melakukan perekrutan dengan mengandalkan tim Bappilu sebagai motor penggerak utama dari partai.

Dari hasil data beberapa narasumber diatas, dapat kita tarik beberapa hal penting dalam proses atau model rekrutmen calon anggota legislatif oleh partai politik di Kabupaten Sidoarjo. Ada beragam cara dan kebijakan partai politik untuk menentukan calon anggota legislatif yang akan bertarung pada pemilu legislatif. di lihat dari segi ideologi partai politik yang ada di Indonesia, ada dua

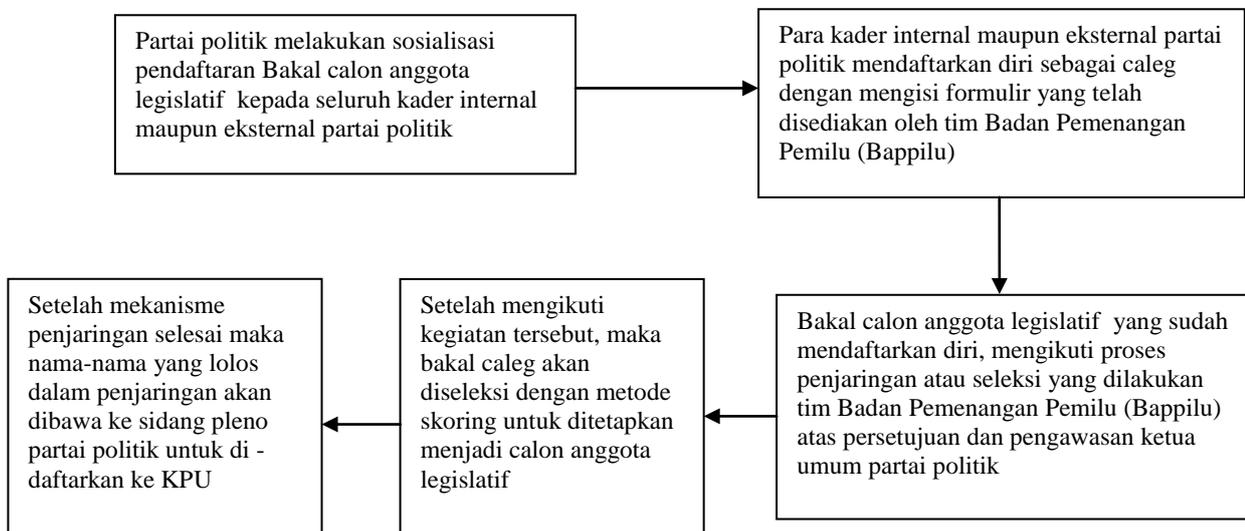
ideologi yang di anut partai politik yakni, ideologi nasionalis dan ideologi agama (islam). Dua ideologi ini yang sedikit membedakan rekrutmen calon anggota legislatif di partai politik Indonesia khususnya di Kabupaten Sidoarjo.

Tahapan Rekrutmen Calon Anggota Legislatif oleh Partai Politik di Kabupaten Sidoarjo

Dalam rekrutmen calon anggota legislatif oleh partai politik yang ada di Kabupaten Sidoarjo memiliki tahapan mekanisme dalam penjarangan bakal calon anggota legislatif di partai politik sampai pada akhirnya di tetapkan menjadi calon anggota legislatif di partai politik yang ada di Kabupaten Sidoarjo. berikut ini gambar 1.2 tentang kerangka model rekrutmen calon anggota legislatif oleh partai politik di Kabupaten Sidoarjo :

Gambar 2.

Kerangka Model Rekrutmen Calon Anggota Legislatif oleh Partai Politik di Kabupaten Sidoarjo



Dari tahapan mekanisme rekrutmen calon anggota legislaif oleh partai politik di Kabupaten Sidoarjo di atas terbagi menjadi 3 (tiga) alur seleksi tahap I, seleksi tahap II dan seleksi tahap akhir. berikut ini uraian tentang alur mekanisme rekrutmen calon anggota legislatif oleh partai politik di Kabupaten Sidoarjo:

1. Seleksi Tahap I (Seleksi Kelengkapan Administrasi)

Dalam seleksi tahap pertama panitia penerimaan pendaftaran bakal calon anggota legislatif di Partai Politik Kabupaten Sidoarjo berkas-berkas administrasi pelamar bakal calon anggota legislatif yang masuk kedalam sekretariat panitia penerimaan pendaftaran bakal calon anggota legislatif kemudian bakal di seleksi oleh tim penjaringan atau tim rekrutmen calon anggota legislatif partai politik. Dimana tim tersebut sebagian besar partai politik di Kabupaten Sidoarjo menggunakan tim yang namanya Bappilu (Badan Pemenangan Pemilu) yang di bentuk atau masuk dalam struktur organisasi Partai Politik di Kabupaten Sidoarjo.

Tim penjaringan atau tim rekrutmen calon anggota legislatif partai politik menyeleksi kelengkapan administrasi berkas lamaran bakal calon anggota legislatif sebagaimana beberapa kriteria kelengkapan administrasi yang diwajibkan untuk dilengkapi oleh bakal calon anggota legislatif. Keseluruhan kerja tim penjaringan atau tim rekrutmen calon anggota legislatif partai politik ini diawasi oleh ketua Badan Pemenangan pemilu (Bappilu) dan ketua umum Dewan Pimpinan Partai Politik Kabupaten Sidoarjo. Setelah berkas-berkas kelengkapan administrasi bakal calon anggota legislatif dianggap lengkap atau memenuhi syarat, maka selanjutnya, bakal calon anggota legislatif yang telah memenuhi persyaratan. kemudian bakal calon anggota legislatif partai politik mengikuti seleksi atau tahapan selanjutnya.

2. Seleksi Tahap II (Wawancara, dll)

Dalam seleksi tahap ini para bakal calon anggota legislatif melewati serangkaian kegiatan diantaranya wawancara serta tatap muka secara langsung dengan tim Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu), dimana tim penilai ini bekerja sama dengan pihak eksternal bisa dari kalangan akademisi atau sesepuh partai politik. Serangkaian tes dilakukan oleh Dewan Pimpinan Partai Politik di Kabupaten Sidoarjo bertempat di masing-masing sekretariat (kantor) Dewan Pimpinan partai politik di Kabupaten Sidoarjo. Proses seleksi yang dilakukan di tahap ini, parameter penilaiannya dilakukan berdasarkan standar Dewan Pimpinan partai politik di Kabupaten Sidoarjo. Sedangkan parameter penilaiannya terkait dengan visi misi, program, peka dan peduli terhadap permasalahan rakyat, yang di dalamnya juga di nilai tentang profil seorang bakal calon anggota legislatif yang mempunyai nilai ketokohan, basis massa, pendidikan, modal finansial yang digunakan untuk maju dalam pemilihan legislatif dll dari bakal calon anggota legislatif.

3. Seleksi Tahap Akhir

Setelah proses-proses penjaringan bakal calon anggota legislatif diatas dilakukan secara seksama. Tim penjaringan atau tim rekrutmen calon anggota legislatif melakukan rapat koordinasi dengan ketua umum Dewan Pimpinan Partai politik di Kabupaten Sidoarjo dan ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Dewan Pimpinan partai politik di Kabupaten Sidoarjo sebelum memberikan hasil penilaian akhir. Setelah itu tim kemudian memberikan hasil penilaian dalam bentuk bobot angka yang menunjukkan hasil total skoring dari setiap bakal calon anggota legislatif.

Dalam keseluruhan proses seleksi tahap ini, keseluruhan hasil seleksi atau penjaringan bakal calon anggota legislatif dalam penetapannya dilakukan sidang-sidang yang langsung dipimpin oleh ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) dan ketua umum Dewan Pimpinan partai politik di Kabupaten Sidoarjo. Dimana nantinya didalam sidang-sidang tersebut nantinya diadakan koordinasi dan penetapan bakal calon anggota legilatif untuk dijadikan calon anggota legislatif yang akan mewakili partai politik dalam pemilihan legislatif. Untuk selanjutnya, penetapan nomor urut caleg dilakukan berdasarkan kriteria ketua umum partai politik dan tim Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu). Jumlah calon anggota legislatif yang telah ditetapkan menyesuaikan dengan jumlah kuota yang telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabuapten Sidoarjo. Yang mana masing-masing partai politik maksimal mendaftarkan calon anggota legislatif 50 orang sesuai dengan kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidoarjo.

SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Model rekrutmen calon anggota legislatif partai politik di Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan model rekrutmen politik dari kolaborasi Model Rekrutmen antara lain model Barber, Snowiss, Rush & Althoff dkk. Dimulai dengan sosialisasi pendaftaran, seleksi, setelah itu dilakukan dengan penetapan calon anggota legislatif oleh tim Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) partai politik di Kabupaten Sidoarjo dan di beri nomor urut sesuai dengan kriteria ketua umum partai politik dan Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu). Selanjutnya, di daftarkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sidoarjo untuk di tetapkan menjadi Calon Anggota Legislatif (Caleg) tetap dengan nomor urutnya.

2. Saran

Partai politik harus tetap mempertahankan konsistensi dalam melakukan perekrutan calon legislatif sesuai syarat yang ditentukan oleh masing-masing partai sehingga nantinya dihasilkan anggota legislatif yang berkualitas sesuai ideologi masing-masing partai dan sesuai harapan dari rakyat karena anggota legislatif merupakan wakil rakyat dalam menyampaikan aspirasi di pemerintahan.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih Kami sampaikan kepada Ditjen DIKTI Kementerian Riset dan Perguruan Tinggi yang telah memberikan kesempatan kepada Kami tenaga pendidik/dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sidoarjo dalam memanfaatkan dana penelitian dosen pemula (PDP). Selain itu, Kami ucapkan terima kasih kepada informan dalam penelitian ini yang telah memberikan bantuannya dalam memberikan berbagai informasi terkait dengan tema penelitian yaitu Model Rekrutmen Politik Calon Anggota Legislatif Oleh Partai Politik Di Kabupaten Sidoarjo. Semoga dengan terselesaikannya laporan akhir dan penerbitan jurnal dalam JKMP ini dapat memberikan sumbangsih wawasan dan pengetahuan keilmuan sosial khususnya ilmu administrasi publik dan menjadi masukan ke depan bagi terkait rekrutmen perwakilan masyarakat sebagai anggota legislatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiarjo, Miriam. (2002). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Creswell, W. (2014). *Research Design pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gaffar, Afan. (2006). *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Miles, Matthew B dan Huberman, A. Michael. (2014). *Analisis data kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia press.
- Rush, Michael & Althoff, Philip. (1997). *Sosiologi Politik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soetomo. (2007). *Perilaku Organisasi & Rekrutmen Politik*. Jakarta: Prenada.
- Soetomo. (2007). *Perilaku Politik Legislatif*. Jakarta: Prenada.
-

Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

<http://deskripsi.com/singkatan/caleg>.

<http://kamusbahasaindonesia.org>.

<http://surabaya.okezone.com/read/2012/10/22/339/707574/ical-syarat-caleg-partai-golkar-harus-terkenal>.

<http://www.tribunnews.com/2012/10/30/nurdin-halid-meradang-syarat-caleg-mendiskreditkan-dirinya>.
